

Intepretasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Desa Panggungharjo Tahun 2021

Paradigma pembangunan desa bergeser pasca lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014. Dari yang sebelumnya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, menjadi desa dalam posisi strategis sebagai subjek utama penggerak pembangunan otonom yang berada dalam wilayah kabupaten. Desa didorong sebagai aktor utama pembangunannya sendiri, serta dituntut menjadi entitas yang mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa. Jadi, kedaulatan negara sejatinya terletak pada kemandirian desa-desa sebagai entitas penyusun dan penyangga nama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

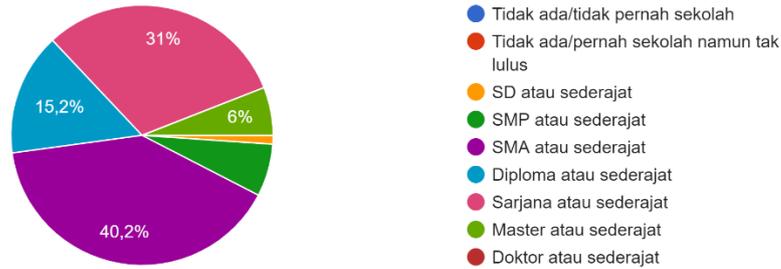
Negara telah merekognisi kewenangan bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang berarti membuka kesempatan yang sama bagi semua desa mencapai kemandiriannya. Bak proposisi *no mandate without funding*, pemberian kewenangan tersebut juga dibarengi dengan alokasi anggaran sebagai stimulan pembangunan desa.

Namun, masuknya dana pembangunan desa melalui dana desa, juga dibarengi dengan masuknya korupsi di desa. Dari pantauan data Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga tahun 2020 setidaknya ada 444 kasus korupsi di desa yang berhasil dibongkar aparat penegak hukum. Dan di tahun 2020 terdapat 129 kasus korupsi anggaran desa. Tertinggi di antara korupsi sektor lain. Peneliti ICW Lalola Easter dalam webinar pemaparan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021, menyebutkan bahwasanya aktor yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka tindak korupsi di semester I 2021 adalah aparat desa.

Catatan-catatan merah di atas menunjukkan bagaimana pentingnya membangun desa yang berintegritas dan terbebas dari korupsi. Untuk itu Desa Panggungharjo melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat di tahun 2021 ini. Survei ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna layanan pemerintah Desa terkait dengan usaha pencegahan korupsi dan tingkat kepuasan atas layanan yang terdapat di lingkungan Pemerintah Desa Panggungharjo. Melalui survei tersebut diharapkan Pemerintah Desa Panggungharjo dapat memetakan potensi korupsi sehingga dapat dirancang skenario pencegahan serta dapat digunakan untuk mendorong perbaikan layanan melalui penciptaan etos kerja yang melayani, bersih, berintegritas dan bebas korupsi.

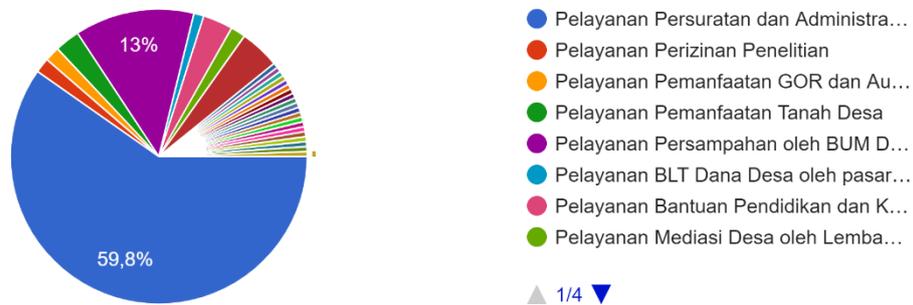
Dari form daring yang disebar oleh pemerintah desa, terdapat 184 responden yang mengisi form tersebut. Dari 184 responden tersebut, sebanyak 48 orang atau 26,1 % bekerja sebagai wiraswasta, 45 orang atau 24,5 % pekerja rumah tangga, 31 orang atau 16,8 % pegawai swasta, dan 24 orang atau 13 % merupakan pegawai negeri. Selain itu terdapat responden yang merupakan pelajar/mahasiswa, petani, pedagang, pengasuh anak, buruh pabrik, buruh tani, sopir/ojek, pemuka agama, pelaku seni, profesi khusus (dokter, bidan, apoteker, notaris, terapis) yang semuanya di bawah 4 % dari total responden. Dilihat dari latar belakang pendidikan, paling banyak merupakan lulusan SMA, kemudian sarjana, diploma, master, lulusan SMP, dan terakhir lulusan SD.

Pendidikan Terakhir
184 jawaban



Sementara untuk jenis pelayanan yang pernah diterima responden, mayoritas pernah mengakses pelayanan surat menyurat yaitu sebanyak 59,8 % atau 110 orang. Dan sebanyak 13 % atau 24 orang pernah mengakses layanan sampah dari pemerintah melalui BUMDes. Untuk jenis pelayanan lainnya hanya di bawah 4 %.

Jenis layanan yang pernah diterima dari Pemerintah Desa Panggungharjo (jawaban bisa lebih dari satu)
184 jawaban



Survei Persepsi Anti Korupsi

Untuk merekam persepsi anti korupsi dari warga desa, terdapat 6 poin pertanyaan yang diajukan pemerintah desa kepada para responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan pernah atau tidaknya mengetahui budaya atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengurusan layanan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo, pernah atau tidaknya melakukan pemberian tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo (meskipun tidak diminta) baik dalam bentuk barang ataupun uang, pernah atau tidaknya mendapat informasi tentang oknum-oknum petugas yang melakukan praktik korupsi, pernah atau tidaknya ditawarkan memperoleh pelayanan dari Pemerintah Desa Panggungharjo yang lebih cepat dan mudah dengan memberi imbalan, pernah atau tidaknya dipersulit oleh Pemerintah Desa Panggungharjo untuk mendapatkan layanan karena terindikasi dugaan petugas tersebut menghendaki imbalan, dan pernah atau tidaknya dihubungi oleh seseorang untuk mendapatkan layanan tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo.

Dari 6 poin pertanyaan di atas diberikan 3 pilihan jawaban yaitu sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Semuanya pertanyaan yang diajukan memiliki jawaban tidak pernah di atas 93 % atau dalam kata lain 170 orang lebih menjawab tidak pernah mengalami atau mengetahui hal-hal yang dipertanyakan. Sementara untuk jawaban kadang-kadang paling banyak 12 orang (6,5 %) dan paling

sedikit 2 orang (1,1 %) memilih jawaban ini. Jawaban kadang-kadang paling banyak di pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan informasi adanya oknum-oknum Pemerintah Desa Panggungharjo melakukan praktik korupsi, dan yang paling sedikit di poin pertanyaan keenam yang berkaitan pernah atau tidaknya dihubungi oleh seseorang untuk mendapatkan layanan tanpa melalui prosedur resmi. Untuk jawaban sering hanya terdapat di 3 pertanyaan, yaitu dipertanyaan kedua, keempat dan keenam. Namun masing-masing pertanyaan tersebut hanya terdapat 3, 1, dan 1 orang saja yang menjawab sering atau dapat dikatakan jawaban sering dibawah 1,7 % dari total responden.

Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

Pada bagian survei ini diajukan 9 poin pertanyaan kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, kemudahan prosedur, kecepatan, kewajaran biaya/tarif, kesesuaian antara standar pelayanan yang tercantum dan yang diberikan, kompetensi/kemampuan petugas, kesopanan dan keramahan petugas, kualitas sarana dan prasarana, dan penanganan atas aduan masyarakat.

Dalam survei ini responden diberikan pilihan jawaban tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Dari keempat pilihan jawaban tersebut dari keseluruhan pertanyaan mayoritas menjawab sesuai. Jawaban yang paling sedikit dipilih adalah jawaban tidak sesuai yang hanya ada di poin pertanyaan berkaitan dengan kecepatan layanan, biaya, kesopanan/keramahan, dan penanganan atas aduan.

Poin tentang kesopanan dan keramahan menjadi poin yang cukup menjadi konsen bagi responden. Pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut yang paling banyak mendapat respon negatif, 23 orang menjawab kurang sesuai dan 1 orang menjawab tidak sesuai. Ketika responden ditanya aspek mana yang masih perlu diperbaiki, yang paling banyak dipilih adalah aspek perilaku petugas yang berkaitan dengan kesopanan dan keramahan.

Berikut kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Dan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) Desa Panggungharo Sewon Bantul Yogyakarta Tahun 2021 yang disebarakan antara tanggal 9 – 20 November 2021 melalui link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEIJfzPnu3dNjN27EIo5VB8P1z98NoffnSldFoD9_VE5CfOw/viewform